

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik(Good Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan masyarakat karena pengaruh globalisasi.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga, pengawasan dan penilai akuntabilitas, selanjutnya misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik telah di kembangkan media pertanggungjawaban pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi

Presiden Republik Indonesia tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Laporan ini menjelaskan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini diharapkan dapat membantu menyusun rencana strategik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, atau dampak. Laporan Kinerja tahun 2021 adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2021 juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintah no 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberikan instruksi untuk ikut turun langsung terhadap 2 agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024 yaitu “

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing “. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan factor pendukung internal keberhasilan kinerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Laporan Kinerja ini merupakan informasi terbuka, terinci, dan terkini kepada masyarakat tentang kinerja BKKBN. Laporan kinerja ini juga menjelaskan secara singkat mengenai capaian kinerja BKKBN yang disusun berdasarkan RENJA program dan anggaran Tahun 2021.

UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KKBPK), dimana pada akhir tahun 2019 Program KKBPK dikemas menjadi lebih menarik menjadi Bangsa Kencana

Bangsa Kencana adalah program yang sudah berjalan dari tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk merencanakan kehidupan baik dalam kandungan, Balita, Remaja, Memasuki pernikahan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Program Bangsa Kencana juga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok

kegiatan di masyarakat yang dalam hal ini difokuskan pada Bina Keluarga Remaja (BKR).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas bagaimana proses dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat yang dituangkan kedalam Tugas Akhir dengan judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pada latar belakang ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang didapat dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kegiatan magang ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang didapat dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

1.4 Metode Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Barat yang menjadi objek magang sehingga didapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan magang.

b. Study Kepustakaan (Library Research)

Dengan mengumpulkan bahan dari buku, koran dan juga laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini, serta sumber informasi lain untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan nantinya.

c. Metode Analisis

Studi ini untuk menganalisis teori yang telah diterima penulis dari perkuliahan dengan kenyataan dilapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan untuk laporan magang ini terbagi atas lima bab ,dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi tentang latar belakang,rumusan masalah,tujuan penulisan, metode penelitian,serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI :

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas dan juga menjelaskan Pengertian Laporan,pengertian akuntabilitas,pengertian kinerja,pengertian pengukuran kinerja,manfaat pengukuran kinerja,pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,prinsip LAKIP,manfaat LAKIP,fungsi LAKIP,tujuan LAKIP,pokok waktu penyampaian LAKIP,dan dasar hukum pemberlakuan LAKIP.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan Sejarah,Visi dan Misi,Kewenangan,Struktur Organisasi,serta Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN :

Bab ini menjelaskan bagaimana proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kendala yang didapat dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Upaya dalam mengatasi kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan penulisan laporan dari pengamatan yang sudah dilakukan, yang dijadikan saran bagi instansi juga pihak-pihak yang berkepentingan di masa depan.

